

PENGARUH PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA TAHUN 2010-2024

Ledi Marina Purba *¹
Joko Suharianto ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

*e-mail : ledimarinaledi@gmail.com, djoko@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh tingkat pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010–2024. Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan terbatasnya kesempatan kerja serta kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sebelum analisis regresi dilakukan, model penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model yang digunakan memenuhi persyaratan analisis ekonometrika. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara pengangguran, IPM, dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan guna menekan tingkat kemiskinan.

Kata kunci: Kemiskinan, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Regresi Linier Berganda.

Abstract

This study analyzes the effect of the unemployment rate and the Human Development Index (HDI) on the poverty rate in North Sumatra Province during the period 2010–2024. Poverty remains a major issue in economic development and is closely related to limited employment opportunities and the quality of human development. This research uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The analytical method used is multiple linear regression. Before conducting the regression analysis, classical assumption tests are carried out, including normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation tests to ensure the validity of the model. The results are expected to provide empirical evidence regarding the relationship between unemployment, HDI, and poverty in North Sumatra and to support policy formulation aimed at reducing poverty.

Keywords: Human Development Index, Multiple Linear Regression, Poverty, Unemployment

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering kali dikaitkan ketidakmampuan di sisi ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan secara absolut diukur berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin (Nst, 2021).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.

Menurut Badan Pusat Statistik penduduk yang dikategorikan sebagai miskin ialah mereka yang memiliki pengeluaran rata-rata perkapita di bawah ambang batas kemiskinan. Ambang batas kemiskinan nasional Indonesia pada Maret 2025 adalah sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan. Artinya, seseorang dianggap miskin jika rata-rata pengeluarannya di bawah angka tersebut dalam sebulan (sekitar Rp 20.305 per hari) berdasarkan survei pengeluaran rumah tangga. Angka ini

merupakan garis kemiskinan yang dihitung dari kebutuhan dasar makanan dan non-makanan termasuk kebutuhan pangan minimal (2.100 kkal) serta kebutuhan sandang, papan, pendidikan, dan Kesehatan.

Secara nasional, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat 8,47 % dari total penduduk, atau sekitar 23,85 juta orang, turun dari 8,57 % (sekitar 24,06 juta orang) pada September 2024. Tren ini menunjukkan penurunan meskipun bersifat bertahap dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia namun penurunannya masih relatif lambat dan belum merata antarwilayah. Perbedaan karakteristik daerah, struktur ekonomi, serta kualitas sumber daya manusia menyebabkan tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia masih cukup timpang. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor struktural, terutama kondisi ketenagakerjaan dan kualitas pembangunan manusia.

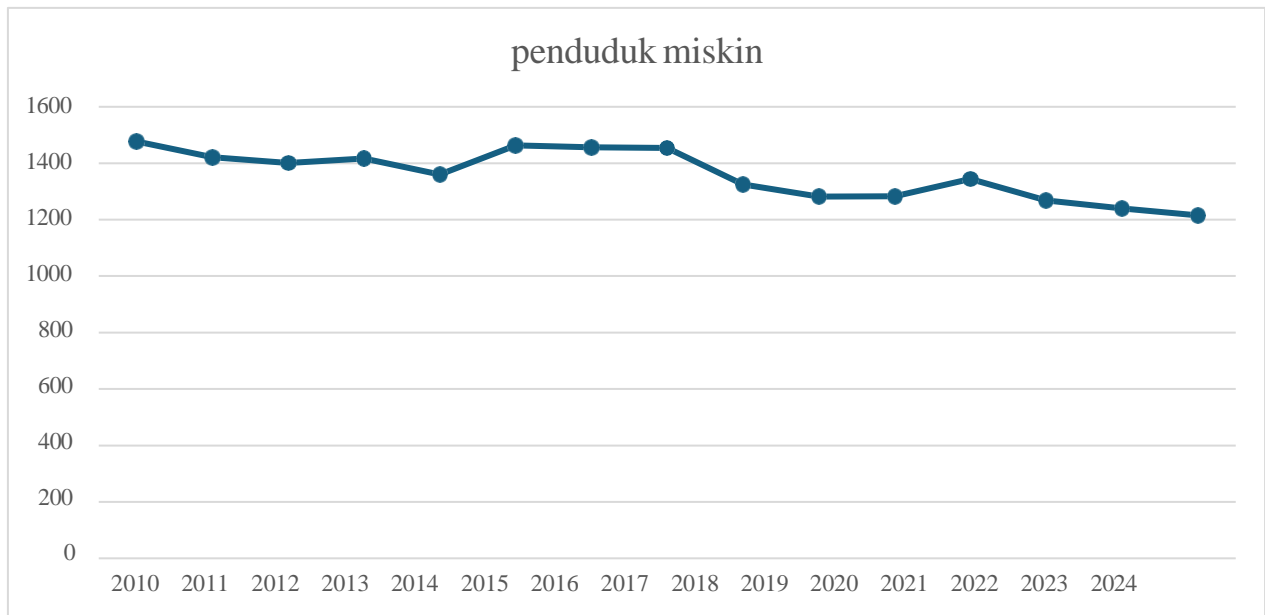
Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah tingkat pengangguran. Pengangguran mencerminkan kondisi ketika seseorang termasuk dalam angkatan kerja namun belum memperoleh pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran menyebabkan sebagian masyarakat tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu daerah, maka semakin besar pula kemungkinan meningkatnya kemiskinan, karena kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi terbatas.

Selain pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi faktor penting yang berkaitan dengan kemiskinan. IPM menggambarkan kualitas hidup manusia yang dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Dalam konteks regional, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk besar dan tingkat kemiskinan yang masih menjadi perhatian. Meskipun IPM di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tingkat kemiskinan belum sepenuhnya menunjukkan penurunan yang stabil. Di sisi lain, tingkat pengangguran di Sumatera Utara juga mengalami fluktuasi pada periode tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kondisi ketenagakerjaan dengan penurunan kemiskinan. Untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tingkat kemiskinan tersebut, perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai peran pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai determinan utama dalam dinamika kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Perubahan kondisi pengangguran dan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu mendorong penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja serta perbaikan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seharusnya diikuti dengan semakin luasnya akses terhadap pekerjaan yang layak, sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan angka kemiskinan dapat ditekan.

Namun demikian, perkembangan pengangguran dan IPM di Sumatera Utara selama beberapa tahun terakhir tidak selalu bergerak searah dengan penurunan kemiskinan dan cenderung mengalami fluktuasi. Kondisi ini dapat dilihat dari data perkembangan kemiskinan, tingkat pengangguran, dan IPM di Provinsi Sumatera Utara yang disajikan pada grafik berikut.



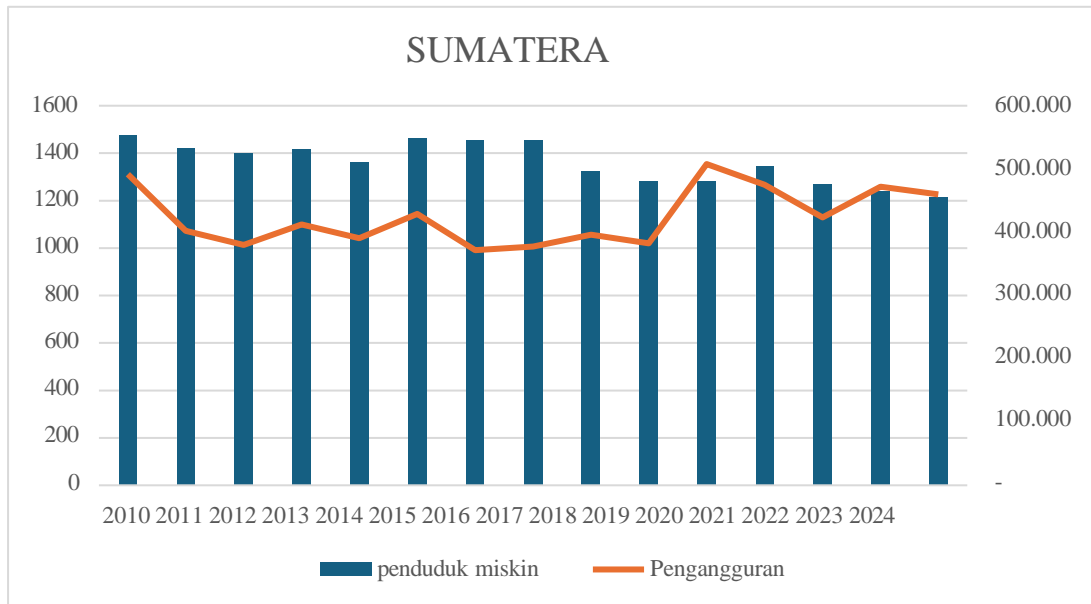
Gambar 1.1 Data jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara periode 2010–2024. Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui Titik grafik yang paling menonjol terlihat pada periode sekitar tahun 2015 dan 2020, ketika jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, peningkatan jumlah penduduk miskin menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang cukup kuat, yang diduga berkaitan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah serta belum optimalnya penyerapan tenaga kerja. Menurut Michael P. Todaro, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh terbatasnya kesempatan kerja dan melemahnya aktivitas ekonomi, sehingga ketika terjadi perlambatan ekonomi, kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan menjadi pihak yang paling terdampak. Kondisi ini menjelaskan mengapa pada periode tertentu grafik menunjukkan kenaikan jumlah penduduk miskin. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan atau sulit memperoleh sumber pendapatan yang stabil, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya angka kemiskinan.

Selanjutnya, lonjakan kembali pada sekitar tahun 2020 menjadi titik penting yang mencerminkan dampak besar gangguan ekonomi, terutama akibat melemahnya aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Situasi ini menyebabkan banyak rumah tangga mengalami penurunan pendapatan, bahkan kehilangan pekerjaan, sehingga mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin. Setelah periode tersebut, grafik kembali menunjukkan kecenderungan menurun, namun lajunya relatif lambat.

Fenomena fluktuasi yang cukup tajam pada tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan di Sumatera Utara belum sepenuhnya stabil dan masih rentan terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, kondisi ini layak diangkat sebagai permasalahan penelitian untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi dinamika kemiskinan, khususnya keterkaitannya dengan perubahan tingkat pengangguran dan kualitas pembangunan manusia.

Fenomena fluktuasi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tidak dapat dilepaskan dari dinamika kondisi pasar kerja yang tercermin melalui tingkat pengangguran. Perubahan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun menunjukkan pola yang tidak stabil, yang pada beberapa periode bergerak searah dengan perubahan jumlah penduduk miskin. Hal ini bisa dilihat pada gambar 1.2



Gambar 1.2 Perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Utara periode 2010–2024.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar 1.2 Ketidakstabilan penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara yang masih disertai dengan fluktuasi pada beberapa tahun tertentu menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan belum sepenuhnya teratasi secara struktural. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan kajian yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi dinamika kemiskinan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi pasar kerja.

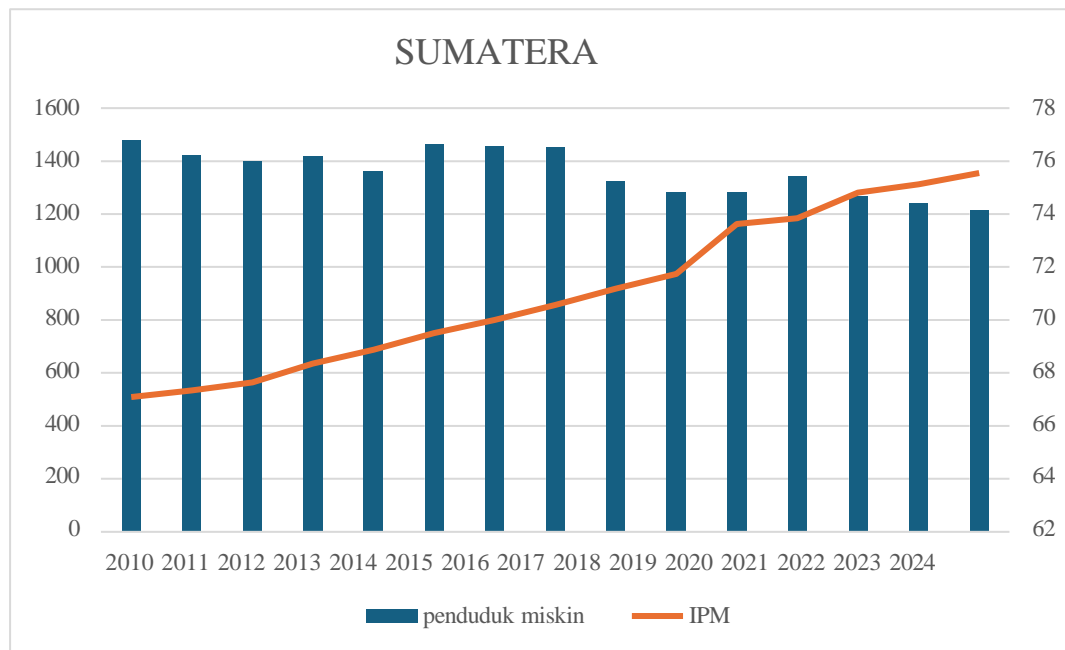
Berdasarkan data periode 2010–2024, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara menurun dari sekitar 1,46 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi sekitar 1,05 juta jiwa pada tahun 2024, namun sempat mengalami peningkatan pada sekitar tahun 2015 dan 2020. Pada periode yang sama, jumlah pengangguran juga menunjukkan pola yang berfluktuasi, dengan kenaikan tajam pada tahun 2020 hingga mendekati 550 ribu orang dan kemudian menurun kembali pada tahun-tahun berikutnya

Pola pergerakan data tersebut mengindikasikan adanya hubungan antara pengangguran dan kemiskinan, di mana peningkatan pengangguran cenderung diikuti oleh kenaikan jumlah penduduk miskin. Temuan ini sejalan dengan pendapat Michael P. Todaro yang menyatakan bahwa keterbatasan kesempatan kerja merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan di negara berkembang. Selain itu, Amartya Sen menegaskan bahwa kemiskinan merupakan bentuk ketidakmampuan individu dalam mengakses peluang ekonomi yang memungkinkan mereka mencapai kehidupan yang layak.

Dengan demikian, kesesuaian antara pola data empiris dan teori para ahli memperkuat dugaan bahwa pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, pengangguran layak dijadikan sebagai salah satu variabel utama dalam penelitian ini untuk menguji secara empiris besarnya pengaruh tersebut serta merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Fenomena fluktuasi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara juga perlu dikaji dari sisi kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Apabila kualitas pembangunan manusia rendah, maka peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan pendapatan yang memadai juga terbatas, sehingga berpotensi memperbesar risiko kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana perkembangan IPM berkaitan dengan dinamika kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebagai dasar dalam memahami permasalahan kemiskinan secara lebih komprehensif. Hubungan tersebut selanjutnya dapat

diamati melalui grafik Gambar 1.3 berikut



Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara periode 2010–2024.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1.2 data periode 2010–2024, IPM Sumatera Utara menunjukkan tren meningkat secara konsisten, dari kisaran 67 pada tahun 2010 menjadi sekitar 75–76 pada tahun 2024. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari sekitar 1,46 juta jiwa menjadi sekitar 1,21 juta jiwa, meskipun sempat mengalami kenaikan pada beberapa tahun tertentu seperti 2015 dan 2020 (Badan Pusat Statistik, diolah).

Pola ini mengindikasikan hubungan yang bersifat berlawanan (negatif) antara IPM dan kemiskinan, di mana peningkatan IPM umumnya diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin. Kenaikan IPM mencerminkan perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas serta peluang masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Amartya Sen, yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan bentuk keterbatasan kemampuan (*capability deprivation*), yaitu ketidakmampuan individu untuk mencapai kehidupan yang layak akibat rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Selain itu, laporan pembangunan manusia oleh United Nations Development Programme menegaskan bahwa peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan merupakan kunci utama dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kesesuaian antara tren data IPM yang meningkat dan kecenderungan penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara memperkuat dugaan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, IPM layak dijadikan sebagai variabel penting dalam penelitian ini untuk menguji secara empiris seberapa besar perannya dalam menekan kemiskinan serta sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ternyata selain permasalahan fluktuasi kemiskinan yang belum menunjukkan penurunan secara stabil, terdapat pula permasalahan kesenjangan antara kondisi data empiris dengan arah teori yang berkembang. Secara teoritis, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat pengangguran seharusnya diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin. Namun, berdasarkan data di Provinsi Sumatera Utara, pada beberapa tahun tertentu justru ditemukan kondisi di mana IPM terus meningkat tetapi jumlah penduduk miskin masih mengalami

kenaikan, seperti pada sekitar tahun 2015 dan 2020. Selain itu, penurunan pengangguran pada periode tertentu juga tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya gap data, yaitu ketidaksesuaian antara harapan teoritis dan fenomena empiris di lapangan.

Selain adanya kesenjangan data, penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) dalam studi-studi sebelumnya yang membahas hubungan antara pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kemiskinan. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan jumlah pengangguran cenderung diikuti oleh bertambahnya jumlah penduduk miskin. Kondisi ini dapat terlihat pada fenomena yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, khususnya pada tahun 2020, ketika jumlah pengangguran meningkat hingga mendekati 550 ribu orang dan pada saat yang sama jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan kesempatan kerja dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan.

Di sisi lain, sejumlah penelitian menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, peningkatan kualitas pembangunan manusia diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010–2024, IPM menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap, yaitu dari sekitar 67 pada tahun 2010 menjadi sekitar 75–76 pada tahun 2024. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin secara umum mengalami penurunan dari sekitar 1,46 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi sekitar 1,05 juta jiwa pada tahun 2024. Meskipun demikian, pada beberapa tahun tertentu seperti 2015 dan 2020, jumlah penduduk miskin justru mengalami peningkatan walaupun nilai IPM terus mengalami kenaikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan secara langsung.

Perbedaan antara temuan empiris di lapangan dan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam menjelaskan hubungan antara pengangguran, IPM, dan kemiskinan. Oleh karena itu, dengan adanya kesenjangan data serta perbedaan hasil penelitian tersebut, kajian mengenai pengaruh tingkat pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara ketiga variabel tersebut pada periode 2010–2024, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam upaya menurunkan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda untuk mengkaji pengaruh tingkat pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (Sugiyono, 2013). Penelitian ini dilakukan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan periode pengamatan dari tahun 2010 hingga 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk time series yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), yang meliputi data tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan (Y) yang diukur berdasarkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara (dalam ribu jiwa). Sementara itu, variabel independen terdiri dari tingkat pengangguran (X1) yang menunjukkan persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan (dalam persen), serta Indeks Pembangunan Manusia (X2) yang menggambarkan tingkat kualitas pembangunan manusia yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

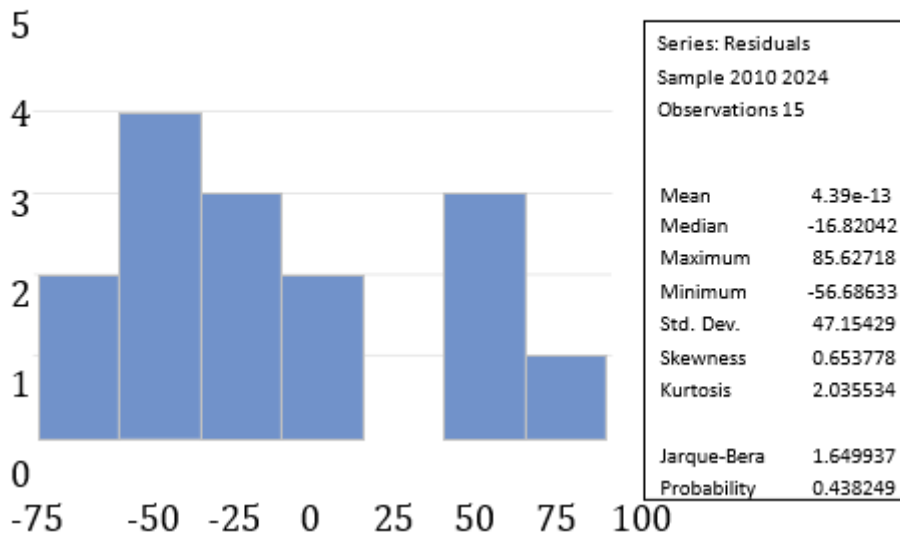
Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews 12 untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi ketentuan dalam analisis ekonometrika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Uji asumsi klasik *Uji Normalitas*

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang valid untuk pengujian hipotesis (uji t dan uji F) adalah model yang memiliki residual terdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik Jarque-Bera (J-B).



Tabel 1.1 Hasil Uji Normalitas

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Jarque-Bera adalah dengan melihat nilai signifikansi atau *Probability*. Jika nilai *Probability* > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil olah data pada Gambar 1, terlihat bahwa nilai statistik *Jarque-Bera* adalah sebesar 1,649937 dengan nilai *Probability* sebesar 0,438249. Karena nilai probabilitas tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,438249 > 0,05), maka hipotesis nol diterima. Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam model regresi penelitian ini terdistribusi secara normal, sehingga memenuhi syarat asumsi klasik untuk analisis statistik inferensial.

Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi linear yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang ideal mensyaratkan tidak adanya hubungan linear yang signifikan antar variabel bebas agar koefisien estimasi bersifat efisien dan tidak bias. Dalam penelitian ini, deteksi multikolinearitas dilakukan dengan mengamati nilai Variance Inflation Factor (VIF) melalui hasil olah data berikut:

Variance Inflation Factors Date: 02/23/26 Time: 17:37 Sample: 2010 2024

Included observations: 15

Variable	Coefficient Variance	Entered VIF	Entered VIF
C	107098.8	619.2795	NA
PENGANGGURAN	0.110460	116.4725	1.232882
IPM	0.002607	761.5740	1.232882

Tabel 1.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 1 di atas, kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai *Centered VIF*. Suatu model dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai *Centered VIF* masing-masing variabel independen berada di bawah angka 10,00. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel SB memiliki nilai VIF sebesar 1,232882 dan variabel JUB juga memiliki nilai VIF sebesar 1,232882.

Mengingat nilai VIF kedua variabel tersebut jauh lebih kecil dari batas toleransi 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

Dengan demikian, variabel SB dan JUB bersifat independen satu sama lain, sehingga model regresi ini memenuhi syarat asumsi klasik untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi syarat adalah model yang memiliki varians residual yang konstan atau disebut dengan homoskedastisitas. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan metode Breusch-Pagan-Godfrey.

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.613539	Prob. F(2,12)	0.1142
Obs*R-squared	4.551333	Prob. Chi-Square(2)	0.1027
Scaled explained SS	1.508179	Prob. Chi-Square(2)	0.4704

Tabel 1.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dasar pengambilan keputusan dalam uji Breusch-Pagan-Godfrey adalah dengan melihat nilai signifikansi pada kolom probabilitas. Jika nilai Prob. Chi-Square (*Obs*R-squared*) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2, diketahui nilai probabilitas *ObsR-squared** adalah sebesar 0,1027. Mengingat nilai tersebut jauh lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,1027 > 0,05), maka model regresi ini dinyatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini mengindikasikan bahwa varians residual data bersifat stabil, sehingga estimasi model tetap akurat dan dapat diandalkan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini, keberadaan autokorelasi diuji menggunakan metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*

Tabel 1.4 Hasil Uji Autokorelasi

Kriteria pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Prob. Chi-Square* pada *Obs*R-squared*. Jika nilai

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.620962	Prob. F(2,10)	0.2456
Obs*R-squared	3.672341	Prob. Chi-Square(2)	0.1594

signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak terdapat masalah autokorelasi pada model regresi. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3, diperoleh nilai *Prob. Chi-Square(2)* dari *Obs*R-squared* sebesar 0,1594. Nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan (0,1594 > 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak memiliki masalah autokorelasi serial. Hal ini

menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara independen dari waktu ke waktu, sehingga parameter yang dihasilkan tetap valid untuk diinterpretasikan.

Uji Hipotesis

Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (Prob.) dari masing-masing variabel terhadap tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu $\alpha = 5\%$ (0,05). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Dependent Variable:
 KEMISKINAN Method: Least
 Squares
 Date: 02/23/26 Time: 17:06
 Sample: 2010 2024
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3145.356	327.2596	9.611196	0.0000
PENGANGGURAN01	0.075757	0.332355	0.227939	0.8235
IPM	-0.255869	0.051061	-5.010997	0.0003

Tabel 1.5 Hasil Uji t

Berdasarkan hasil uji t pada tabel tersebut, variabel Pengangguran memiliki nilai probabilitas sebesar 0,8235, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kemiskinan). Kondisi ini tidak sejalan dengan teori, yang umumnya menyatakan bahwa peningkatan pengangguran akan meningkatkan kemiskinan. Perbedaan ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti adanya bantuan sosial dari pemerintah, sektor informal yang masih menyerap tenaga kerja, serta kemungkinan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang membuat hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak terlihat signifikan dalam data. Selanjutnya, variabel IPM memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0003, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Secara teori, IPM yang meningkat seharusnya menurunkan tingkat kemiskinan, karena mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari kedua variabel independen, hanya IPM yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan, sedangkan Pengangguran tidak berpengaruh signifikan dalam model penelitian ini. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kebijakan pemerintah, serta ketimpangan distribusi pendapatan.

Uji f

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Hasil pengujian simultan dapat dilihat pada tabel berikut:

R-squared	0.712903	Mean dependent var	1360.441
Adjusted R-squared	0.665054	S.D. dependent var	88.00496
S.E. of regression	50.93246	Akaike info criterion	10.87573
Sum squared resid	31129.38	Schwarz criterion	11.01734
Log likelihood	-78.56801	Hannan-Quinn criter.	10.87423
F-statistic	14.89888	Durbin-Watson stat	1.337362
Prob(F-statistic)	0.000560		

Tabel 1.6 Hasil Uji f

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai F-statistic sebesar 14,89888 dengan probabilitas

0,000560. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,000560 < 0,05$), maka variabel Pengangguran dan IPM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Hal ini menunjukkan model regresi sudah layak (fit).

Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, digunakan nilai koefisien determinasi. Berdasarkan hasil regresi, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,665054. Hal ini menunjukkan bahwa variasi Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel Pengangguran dan IPM sebesar 66,51%, sedangkan sisanya sebesar 33,49% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai ini mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup kuat dalam menjelaskan variabel dependen.

B. Pembahasan Penelitian

Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengangguran memiliki nilai probabilitas sebesar 0,8235 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti bahwa secara parsial Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Koefisien regresi sebesar 0,075757 menunjukkan hubungan positif, namun tidak signifikan secara statistik. Secara teoritis, peningkatan pengangguran seharusnya meningkatkan tingkat kemiskinan karena berkurangnya pendapatan masyarakat. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori tersebut. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh adanya sektor informal yang masih mampu menyerap tenaga kerja, bantuan sosial pemerintah, serta kemungkinan ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga pengangguran tidak secara langsung meningkatkan kemiskinan.

Berdasarkan hasil pengamatan data di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010–2024, tingkat pengangguran mengalami perubahan yang tidak stabil dan pada beberapa waktu bergerak searah dengan jumlah penduduk miskin. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pengangguran dan kemiskinan, di mana peningkatan jumlah pengangguran cenderung diikuti oleh meningkatnya jumlah masyarakat miskin.

Kondisi ini terlihat jelas pada tahun 2020, ketika jumlah pengangguran meningkat secara signifikan hingga mendekati 550 ribu orang, yang kemudian diikuti oleh kenaikan jumlah penduduk miskin dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa terbatasnya kesempatan kerja berdampak langsung pada menurunnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka sumber penghasilannya menjadi terbatas sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Secara teori, temuan ini sejalan dengan pendapat Todaro yang menyatakan bahwa pengangguran merupakan salah satu faktor utama penyebab kemiskinan, khususnya di negara berkembang. Tingginya pengangguran menunjukkan rendahnya daya serap tenaga kerja dalam perekonomian. Selain itu, menurut Amartya Sen, kemiskinan juga dapat dipahami sebagai keterbatasan kemampuan individu dalam mengakses peluang ekonomi, termasuk kesempatan kerja yang layak.

Meskipun demikian, terdapat beberapa periode di mana penurunan pengangguran tidak secara langsung diikuti oleh penurunan kemiskinan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan yang tersedia belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah dominasi pekerjaan di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rendah dan tidak stabil. Oleh karena itu, meskipun pengangguran menurun, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan menjadi kurang optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Namun, besar kecilnya pengaruh tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas pekerjaan yang tersedia di masyarakat

Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0003 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti bahwa secara parsial IPM berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Koefisien regresi sebesar -0,255869 menunjukkan hubungan negatif, di mana peningkatan IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan. Secara

teoritis, hal ini sesuai karena IPM mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data selama periode 2010–2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan meningkat dari sekitar 67 menjadi 75–76. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Secara umum, peningkatan IPM diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin, sehingga menunjukkan hubungan yang bersifat negatif antara IPM dan kemiskinan.

Secara teoritis, kondisi ini sesuai dengan konsep pembangunan manusia yang menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan. Pendidikan yang lebih baik membuka peluang kerja yang lebih luas, sementara kondisi kesehatan yang baik mendukung kemampuan individu dalam bekerja secara optimal. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun demikian, pada beberapa tahun tertentu seperti 2015 dan 2020, ditemukan kondisi di mana IPM terus meningkat tetapi jumlah penduduk miskin justru mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM tidak selalu secara langsung berdampak pada penurunan kemiskinan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti ketimpangan ekonomi, dampak krisis, serta distribusi hasil pembangunan yang belum merata.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam IPM belum tentu diikuti dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai. Dalam situasi seperti ini, meskipun kualitas individu meningkat, keterbatasan peluang kerja tetap dapat menyebabkan masyarakat berada dalam kondisi miskin. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara IPM dan kemiskinan bersifat tidak langsung dan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, meskipun pengaruh tersebut tidak selalu konsisten dalam jangka pendek. Efektivitas IPM dalam menurunkan kemiskinan sangat bergantung pada dukungan faktor lain, terutama ketersediaan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial variabel Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan, sedangkan variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM mampu menurunkan tingkat kemiskinan, sementara pengangguran tidak menjadi faktor utama dalam model penelitian ini. Secara simultan, variabel Pengangguran dan IPM bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Selain itu, nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sebagian besar variasi Kemiskinan, meskipun masih terdapat faktor lain di luar model yang turut memengaruhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gandasari, T. R. (2016). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 6(2). <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/>
- Ishak, K. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran dan implikasinya terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia*. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1). <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/121>
- Junaidi, & Junaidi, A. (2023). *Pengaruh produk domestik regional bruto, pendidikan, dan upah terhadap tingkat pengangguran*. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 20(3), 455. <https://doi.org/10.30872/jkin.v20i3.13931>
- Kristin, A., Wibowo, P., Sulia, U., & Abstrak, W. S. (2018). *Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia*. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240

- Mardimin, Y. L. (1996). *Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Kanisius.
- Ningrum, S. S. (2017). *Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011–2015*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/5364/5206>
- Oktavian, A. I., Muslihatiningsih, F., & Lestari, E. K. (2023). *Pengaruh IPM, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017–2021*. *Jurnal Ekuilibrium*, 7(1), 28. <https://doi.org/10.19184/jek.v7i1.33085>
- Suripto, & Sublaili, N. (2020). *Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Yogyakarta periode 2010–2017*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Statistik, B. P. (2024). *Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id>
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. In *Alfabeta. CV* (19th ed.). Alfabeta, CV. [https://www.academia.edu/118903676/Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R and D Prof Sugiono](https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono)